

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya masalah ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menuntut pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Soepriyanto & Aristiani, 2011). Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi titik dimana Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mahmud & Waliyyani, 2015). Otonomi daerah didefinisikan sebagai pemberian sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta pemberian kewenangan dalam memperoleh sumber dana yang dimanfaatkan untuk mendanai urusan ke pemerintahannya (Yusuf, 2014). Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diwujudkan dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah (Mahmud & Waliyyani, 2015).

Pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangannya dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas dilakukan menyeluruh baik dalam peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan pengembangan sumber daya manusia (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah pusat maupun daerah adalah menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Pemerintah yang tidak menyajikan informasi mengenai pendanaan serta sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih diragukan tingkat akuntabilitasnya (Sadjiarto, 2000). Transparansi pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan dari transparansi adalah untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat (Trisnawati & Ahmad, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa semua pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab, serta mengarah pada pelayanan publik yang baik (Hudoyo & Mahmud, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 secara lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta dengan cara yang sederhana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 diimplementasikan dalam bentuk *e-Government* yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan mengenai pemerintahan (Dharma Jaya dan Sisdyani, 2014). Salah satu manfaat yang dengan penggunaan *e-government* adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses informasi pemerintah, sehingga akan menciptakan keterbukaan diantara pemerintah dan masyarakat (Sosiawan, 2015).

Penggunaan website resmi pemda oleh pemerintah daerah di Indonesia meningkat seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (Martani, Fitriyani, & Annisa, 2013). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 pasal 13 disebutkan bahwa penyajian informasi keuangan daerah dilakukan melalui situs resmi pemerintah daerah.

Saat ini seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki website resmi masing-masing. Website tersebut umumnya berisi informasi mengenai daerah, hingga pemanfaatan fasilitas website untuk kegiatan pelayanan masyarakat, pengenalan peraturan dan media komunikasi (Puspita dan Martani, 2012). Menurut Dharma Jaya dan Sisdyani (2014) penyampaian informasi khususnya informasi keuangan dengan menggunakan internet mampu meningkatkan citra positif instansi pemerintah di mata publik.

Pada tahun 2012 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan melalui website resminya masing-masing. Berdasarkan instruksi tersebut pemerintah harus menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) pada masing-masing website resminya. Menurut Instruksi tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk mempublikasikan 12 dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah dalam website resminya. Dokumen tersebut antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD,

(2) Ringkasan RKA PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit dan (12) Opini BPK.

Namun berdasarkan temuan dari Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) pada tahun 2014 ditemukan tiga temuan penting mengenai implementasi Instruksi Mendagri yaitu: masih banyaknya pemda yang tidak patuh terhadap Instruksi Mendagri, adanya penolakan untuk melakukan pemutakhiran data serta permintaan informasi non publik (<http://pattiro.org>). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ masih belum optimal. Berdasarkan temuan dari (PATTIRO) pada tahun 2014 hanya 28% dari total 434 pemda yang mematuhi Instruksi Mendagri, sedangkan sisanya 72% tidak mematuhi instruksi mendagri tersebut.

Pengungkapan laporan keuangan dengan menggunakan media internet telah banyak dilakukan oleh organisasi sektor privat. Sektor privat menggunakan pelaporan tersebut untuk melaporkan kegiatan mereka kepada stakeholder. Bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah (pemda) penggunaan internet untuk menyampaikan laporan keuangan belum menjadi fokus utama. Oleh sebab itu, sektor publik perlu meningkatkan penggunaan internet sebagai media pelaporan keuangan (Hudoyo & Mahmud, 2014).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan melalui internet (*Internet financial Report/IFR*) telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri antara lain penelitian Laswad, *et al.*, (2005) ; Styles & Tennyson (2007) ; Puspita & Martiani (2010); Trisnawati & Achmad (2014), dll namun hasil penelitian sebelumnya masih belum konsisten.

Penelitian Laswad *et al.* (2005) menunjukkan bahwa *Leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan praktik IFR. Sedangkan tipe *council* berhubungan negatif dengan praktik IFR (*Internet Financial Report*) di New Zealand.

Penelitian Styles & Tennyson (2007) menunjukkan bahwa ukuran, kualitas pengungkapan laporan keuangan, pendapatan per kapita berhubungan positif signifikan terhadap ketersediaan data finansial pada situs pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan ukuran, pendapatan perkapita, tingkat hutang serta kondisi finansial berpengaruh terhadap aksesibilitas data finansial pada situs pemerintah di Amerika Serikat.

Di Indonesia penelitian Puspita & Martiani (2012) yang bertujuan untuk menguji rasio PAD, Rasio Ketergantungan, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintah dan Belanja Daerah terhadap tingkat pengungkapan sukarela melalui website pemda. Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio ketergantungan, ukuran pemda dan kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela melalui website pemda.

Sedangkan Trisnawati & Ahmad (2014) yang bertujuan untuk menguji hubungan kompetisi politik, rasio pembiayaan (*leverage*), ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemda, tipe pemda serta opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kompetisi politik, *leverage*, ukuran pemerintah daerah, serta kekayaan pemerintah daerah memengaruhi tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Sedangkan tipe pemda dan opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Berkaitan dengan belum konsistennya hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik ingin meneliti kembali pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan melalui internet (*Internet Financial Report*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DETERMINAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) MELALUI INTERNET “**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati & Ahmad (2014) dan Nosihana. A, & Yaya.,R (2016) dalam menguji determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini menggunakan skoring untuk mengukur publikasi laporan keuangan melalui website pemda. Indikator skoring didasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/S tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan pemerintah tingkat kabupaten sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel pemerintah tingkat provinsi.

Selanjutnya peneliti menambah rentang waktu penelitian menjadi 2 tahun yaitu 2013-2014. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meneliti selama satu tahun saja. Penelitian dimulai dari tahun 2013 bertujuan untuk mengukur seberapa efektif Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/S satu tahun setelah peraturan tersebut dikeluarkan. Peneliti juga menambahkan variabel independen baru yaitu sumber daya manusia (SDM) dan Gaya Kepemimpinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?
2. Bagaimana rasio pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?
3. Bagaimana ukuran pemda berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?
4. Bagaimana opini audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?
5. Bagaimana kompleksitas pemda berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?
6. Bagaimana sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?
7. Bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet oleh pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh kompetisi politik terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
2. Pengaruh rasio pembiayaan utang (*leverage*) terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
3. Pengaruh ukuran pemda terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
4. Pengaruh opini audit terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
5. Pengaruh kompleksitas pemda terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
6. Pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
7. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan bagi:

1. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pihak pemerintah daerah untuk memanfaatkan internet khususnya website pemda sebagai media untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan.

2. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah

Diharapkan pemakai laporan keuangan pemerintah khususnya masyarakat mampu menilai akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

3. Akademisi

Diharapkan menjadi masukan, literatur dan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Batasan Penelitian

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan yaitu :

Determinan yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet hanya kompetisi politik, *leverage*, ukuran pemda, opini audit, kompleksitas pemda, sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan.